

TINGKAT KESESUAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010 TERHADAP PP NO. 3/2007

*Debby Fitriasari*¹
*Dwi Martani*²
*Rahfiani Khairurizka*³

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
^{1,2} {debby.fitriasari, martini}@ui.ac.id
³ rahfiani@gmail.com

Abstrak

Despite of the financial statements, the accountability of local government (LG) is also fulfilled through LPPD, a LG's performance reporting on decentralization, job assistance and government administrative tasks. Research on LPPD in Indonesia is still rare. Febriana (2010) and Dalimunthe (2010) conducted a study related LPPD but does not focus on the completeness of the LPPD. Therefore, the purpose of this study is to analyze the compliance of LPPD to PP No. 3/2007. The compliance level is obtained by comparison the content of the LPPD and the compliance checklist and then this compliance level will be analyzed using statistic descriptive, the mean difference test and correlation test. With a sample of 25 provinces's LPPD year 2010, the results show that the average compliance level is 75%. It means that the LG (province) has not been submitting all the information in LPPD year 2010 in accordance with the PP No. 3/2007. The result of mean different test showed no significant difference in two groups LG based on these variables: LG's assets, level of sovereignty, geography position (west or east Indonesia) and EKPPD value. Moreover, the correlation test results also found no significant correlation between the levels of compliance with these variables.

Keywords: *compliance level, EKPPD, local government accountability, LPPD, performance reporting.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000 dan pertanggungjawaban atas otonomi tersebut menjadi sangat diperhatikan sejalan dengan reformasi keuangan pada tahun 2003. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa seiring dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) maka pemda dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemda dalam mewu-

judkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, pemda tidak hanya dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan keuangan namun juga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 mewajibkan pemda menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP No. 3/2007 yang mewajibkan pemda membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Dalam

PP No. 3/2007 disebutkan secara rinci muatan materi dari masing-masing urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang harus dilaporkan pemda dalam LPPD.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 11 PP No. 3/2007 disebutkan bahwa atas LPPD yang telah dibuat tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut dari pasal 11 PP No. 3/2007 tersebut pemerintah mengeluarkan PP No. 6/2008 dan Permendagri No.73/2009 yang mengatur lebih detail mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja pemda (EKPPD). Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. Hasil dari EKPPD berupa peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian terkait dengan laporan keuangan pemerintah dan tingkat pengungkapannya sudah banyak dilakukan di luar negeri. Steccolini (2002) melakukan penelitian di Italia dengan tujuan mengetahui bagaimana peranan dari laporan keuangan pemerintah lokal sebagai media akuntabilitas publik. Ingram (1984), Robbins dan Austin (1986), Ryan et al. (2002) meneliti tentang tingkat pengungkapan dari laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, Retina (2007) meneliti tingkat kepatuhan dari 40 sampel laporan keuangan pemda (LKPD) tahun 2006 terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP) 2005. Liestiani (2008), Lesmana (2010), Darmastuti dan Setyaningrum (2012) serta Hilmi dan Martani (2012) meneliti tentang tingkat pengungkapan dari laporan keuangan pemda.

Berbeda dengan penelitian terkait laporan keuangan pemda, penelitian terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah belum banyak dilakukan di Indonesia. Sejauh pengetahuan peneliti, sampai saat ini belum terdapat riset yang secara spesifik melakukan penelitian

mengenai pengungkapan pada LPPD padahal sesuai dengan pasal 9 PP No. 3/2007, penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, sama seperti prinsip yang dianut dalam penyusunan LK pemerintahan. Oleh karena itu, pengungkapan materi-materi yang ada dalam LPPD juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di luar negeri, penelitian terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah sudah banyak dilakukan. Neale and Pallot (2001) di Belanda, Moore et. al (2005), Brown (2007), Mccall (2009), Smith and Schiffel (2009) dan Ho and Park (2012) di Amerika, Zhao (2011), Shang and Hui (2011) dan Yue and Huping (2011) di Cina. Sedangkan untuk di Indonesia, penelitiannya belum sebanyak dan semaju penelitian di luar negeri karena topik kinerja masih merupakan hal yang baru di pemerintahan Indonesia. Febriana (2010), Dhuanovawati (2010) dan Dalimunthe (2010) melakukan penelitian terkait dengan kinerja pemda yang menggunakan data LPPD, namun ketiganya tidak melakukan penilaian atas tingkat kesesuaian pengungkapan dari LPPD tersebut. Sedangkan Mustikarini dan Fitriarsi (2012), Pranataningrum (2012), dan Budianto (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kinerja penyelenggaraan pemda kabupaten/kota (EKPPD) di Indonesia dimana sumber utama pengukuran kinerjanya tersebut menggunakan data-data LPPD.

Dari penelitian terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah yang telah dilakukan di Indonesia sebelumnya, semuanya menggunakan sampel pemda kabupaten/kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD terhadap PP No. 3/2007 dengan menggunakan sampel pemda propinsi. Karakteristik pemda propinsi sedikit berbeda dengan pemda

kabupaten/kota karena selain melaksanakan wewenang otonomi daerah, propinsi juga memiliki peranan yang penting sebagai koordinator dari kabupaten/kota yang ada di bawahnya sesuai dengan pasal 38 dari UU No. 32/2004. Dengan mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian pengungkapan informasi dalam LPPD maka diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan sebagai umpan balik bagi pemda.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian, Metode Analisis dan Data Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dapat dilihat di Gambar 1 dengan detail penjelasan sebagai berikut:

1. Studi literatur/regulasi sebagai dasar pembuatan ceklist penghitungan skor tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek pengungkapan informasi dalam LPPD, tidak mencakup aspek nilai kinerja maupun kebenaran informasi. Acuan utama pembuatan ceklist ini adalah PP No. 3/2007.
2. Berdasarkan studi literatur/regulasi, dibuat ceklist tingkat kesesuaian pengungkapan.
3. Tiap sampel pemda akan dilihat kesesuaian dan kelengkapan isinya terhadap PP No. 3/2007 dengan cara membandingkan isi LPPD dengan ceklist yang sudah dibuat. Hasil kegiatan ini berupa skor tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD masing-masing pemda.

Berdasarkan data skor tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif, uji beda rata-rata dan uji korelasi. Sesuai dengan Gambar 1, analisis dilakukan dalam 3 bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif, dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat kesesuaian

pengungkapan LPPD untuk keseluruhan pemda dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

2. Analisis uji beda rata-rata dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat kesesuaian pengungkapan diantara dua kelompok pemda yang dilihat dari ukuran (aset), tingkat kemandirian pemda (persentase Pendapatan Asli Daerah /PAD terhadap total pendapatan) dan letak geografisnya di bagian barat Indonesia atau di bagian timur Indonesia. Selain itu, perbedaan juga akan dilihat dari hasil nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang diperoleh masing-masing propinsi. Hal ini menarik untuk dilihat karena kelengkapan informasi dalam LPPD juga merupakan salah satu unsur yang dinilai dalam EKPPD meskipun bobotnya kecil.

Analisis uji beda rata-rata ini dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 15.

3. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara nilai tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD pemda tahun 2010 dengan besarnya aset pemda, tingkat kemandirian pemda, dan nilai EKPPD.

Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yang terdapat dalam *software* SPSS 15.

4. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa LPPD pemda propinsi tahun 2010. Data diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP. LPPD yang berhasil diperoleh hanya LPPD dari 25 pemda propinsi (Lampiran 1) tahun anggaran 2010 dari total keseluruhan 33 propinsi yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Ceklist Tingkat Pengungkapan

Ceklist tingkat pengungkapan dibuat dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/313/OTDA tentang Penyusunan LPPD Tahun 2010. Ceklist dibagi menjadi 6 bagian besar dengan jumlah poin di masing-masing bagian dapat dilihat pada Lampiran 2. Total poin keseluruhan adalah 542 poin dengan asumsi suatu pemda tidak memiliki prioritas urusan pilihan dan tidak melakukan tugas pembantuan. Namun jika pemda memiliki urusan prioritas dan atau melakukan tugas pembantuan maka total poin keseluruhan akan lebih besar daripada 542 poin.

Selanjutnya, dilakukan pencocokan isi dari 25 LPPD yang sudah diperoleh dengan ceklist yang telah dibuat. Jika pemda melaporkan sesuai dengan ceklist akan diberi nilai 1 dan jika tidak melaporkan akan diberi nilai 0. Namun jika pemda tidak melakukan suatu urusan pilihan atau tugas pembantuan maka akan diberikan tanda NA (*not applicable*) dan tidak dimasukkan dalam perhitungan skor tingkat pengungkapan. Skor tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total poin yang seharusnya diungkapkan dalam LPPD untuk mendapatkan skor tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Tingkat Kesesuaian Pengungkapan LPPD

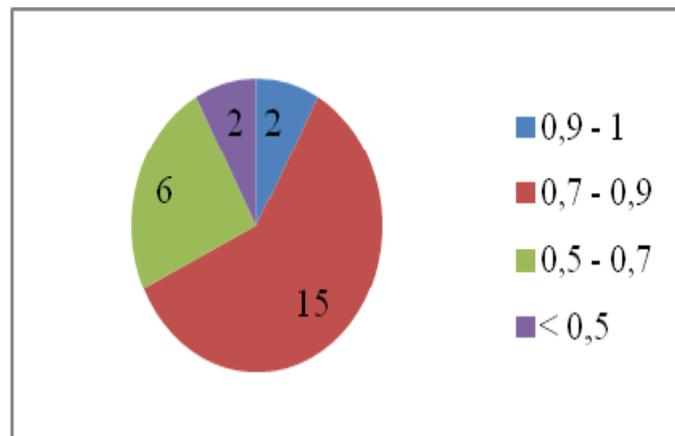
Sesuai dengan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, sampel penelitian ini

adalah 25 LPPD pemerintah daerah tingkat 1 atau propinsi tahun 2010. Masing-masing LPPD dihitung nilai skor tingkat kesesuaian pengungkapannya. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata total nilai skor tingkat kesesuaian pengungkapan untuk ke-25 sampel adalah 0,75. Hal ini berarti bahwa hanya 75% isi LPPD dari data sampel telah sesuai dengan PP No. 3/2007 atau dengan kata lain pemda propinsi belum melaporkan secara lengkap semua informasi yang diminta dalam LPPD 2010. Secara umum, data yang tidak atau belum disajikan dalam LPPD pemda tahun 2010 adalah terkait dengan data jumlah pegawai dan jenis-jenis pegawai sesuai dengan masing-masing urusan (desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan). Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena suatu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sebagai pelaksana urusan-urusan pemerintahan tersebut, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa urusan pemerintahan sehingga SKPD tersebut merasa kesulitan untuk memilah-milah pegawainya berdasarkan masing-masing urusan. Sehingga sebagai akibatnya, pemda hanya melaporkan informasi pegawainya berdasarkan SKPD saja tapi tidak berdasarkan urusan pemerintahan.

Jika dikelompokkan berdasarkan nilai skornya, sebagian besar propinsi berada pada kelompok skor 0,7 – 0,9 (Gambar 2). Sedangkan propinsi di kelompok tertinggi dan terendah masing-masing hanya terdiri dari 2 propinsi. Lebih lanjut, dari Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa 3 propinsi dengan skor tertinggi berada di luar Pulau Jawa.

Sedangkan jika dilihat dari skor yang terendah, dua propinsi terendah berada di luar Pulau Jawa. Hasil ini menunjukkan bahwa propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa memiliki rentang nilai skor yang lebih besar (0,32 sampai dengan 0,97) dibandingkan propinsi yang berada di Jawa (0,51 sampai dengan 0,88). Atau dengan kata lain, propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa memiliki tingkat pengungkapan yang sangat bervariasi, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jika kita perhatikan, dua propinsi dengan nilai tertinggi berada di wilayah barat Indonesia (Pulau Sumatera) sedangkan dua propinsi terendah berada di wilayah timur Indonesia. Perbedaan letak geografis ini yang mungkin menyebabkan skor pengungkapan propinsi di luar Pulau Jawa sangat bervariasi.

Selanjutnya, dari 6 propinsi yang ada di Pulau Jawa, dua propinsi mendapatkan skor kurang dari 60% yaitu Jawa Timur (52%) dan Banten (51%). Hasil ini tidak sejalan dengan skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) tahun 2010 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (dengan sumber data utama EKPPD berasal dari LPPD 2010) dimana Jawa Timur merupakan propinsi dengan skor tertinggi sedangkan Lampung menduduki urutan ke-17. Hasil ini menunjukkan bahwa kelengkapan informasi dalam LPPD bukan merupakan komponen yang utama dalam menentukan baik tidaknya kinerja dari suatu propinsi.



Gambar 2. Jumlah Propinsi Berdasarkan Kelompok Nilai Skor

Tabel 1.
Tiga Propinsi dengan Skor Tertinggi dan Terendah

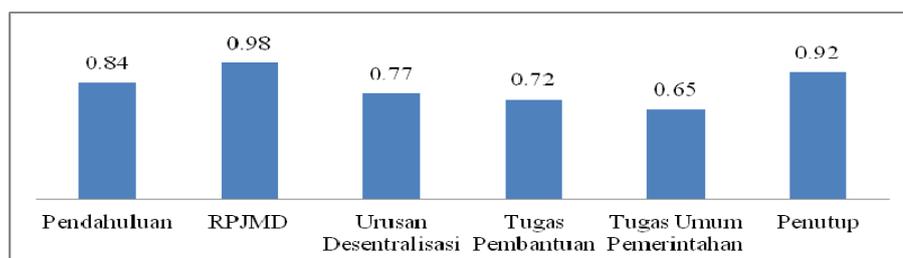
No	Propinsi	Skor Tertinggi	No	Propinsi	Skor Terendah
1	Lampung	0,97	1	Sulawesi Utara	0,32
2	Riau	0,93	2	Maluku Utara	0,40
3	Nusa Tenggara Timur	0,89	3	Banten	0,51

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ceklist tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD terdiri dari 6 bagian besar, yaitu 1) Pendahuluan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 3) Urusan Desentralisasi, 4) Tugas Pembantuan, 5) Tugas Umum Pemerintahan dan 6) Penutup. Untuk keenam bagian LPPD, rata-rata skor tingkat kesesuaian pengungkapan dari keseluruhan sampel dapat dilihat pada Gambar 3. Dari Gambar 3 tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan tertinggi pada bagian RPJMD sedangkan yang terendah pada bagian Tugas Umum Pemerintahan. Untuk bagian Penutup yang hanya 1 poin, dari Gambar 3 tersebut dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua propinsi menyajikan bagian ini. Propinsi yang tidak menyajikan bagian Penutup dalam LPPD tahun 2010 adalah Kalimantan Timur dan Gorontalo. Sedangkan untuk bagian Pendahuluan, yang nilai rata-ratanya cukup tinggi yaitu 0,84, terdapat 6 propinsi yang menyajikan semua informasi yang diminta (dengan kata lain nilai skornya 1) dan 3 propinsi memiliki nilai skor terendah yaitu 0,64. Nilai terendah tersebut karena ketiga propinsi tidak memberikan informasi mengenai komposisi penduduk menurut struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan.

Dari Gambar 3 dapat juga diketahui bahwa nilai tingkat kesesuaian pengungkapan untuk bagian RPJMD (yang terdiri dari 5 poin) mendekati nilai sempurna yaitu 0,98. Hampir semua

propinsi telah memberikan penjelasan secara lengkap mengenai RPJMD dalam LPPDnya sesuai dengan regulasi kecuali propinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini bisa dipahami karena informasi mengenai RPJMD merupakan informasi yang sangat mendasar dan pasti dimiliki oleh semua propinsi. Sedangkan untuk bagian Tugas Pembantuan, yang terdiri dari Tugas Pembantuan yang Diterima dan Tugas Pembantuan yang Diberikan, Tugas Pembantuan yang Diterima paling banyak dimiliki Jawa Timur dengan 20 tugas pembantuan sedangkan untuk bagian Tugas Pembantuan yang Diberikan paling banyak dilaporkan Maluku Utara dengan 8 tugas pembantuan. Namun terdapat 17 propinsi yang tidak memberikan informasi mengenai Tugas pembantuan Yang Diterima di dalam LPPDnya.

Untuk bagian Urusan Desentralisasi yang merupakan tugas pelaksanaan otonomi pemda, nilai skor pengungkapan lebih detail untuk setiap 4 sub bagian dapat dilihat di Gambar 4. Rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan tertinggi adalah sub bagian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sedangkan yang terendah pada sub bagian Ringkasan Urusan Desentralisasi. Sub bagian IKK memiliki nilai rata-rata skor 1 atau dengan kata lain semua propinsi telah mengungkap sub bab ini dalam LPPD. Hal ini bisa dipahami karena Informasi data-data IKK ini diperlukan dalam penilaian EKPPD propinsi yang bersangkutan.



Gambar 3. Rata-rata Skor Tingkat Kesesuaian Pengungkapan per Bagian LPPD



Gambar 4. Rata-rata Skor Tingkat Kesesuaian Pengungkapan Setiap Bagian Urusan Desentralisasi

Yang menarik, untuk informasi terkait dengan sub bagian Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan, hanya 2 propinsi yang memiliki skor sempurna menyajikan keseluruhan informasi untuk ke-26 urusan wajib yaitu Lampung dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan terkait ke-26 urusan wajib yang harus diselenggarakan propinsi.

Yang terakhir adalah bagian Tugas Umum Pemerintahan yang memiliki rata-rata nilai tingkat kesesuaian pengungkapan terendah dibanding lima bagian yang lain yaitu 0,65 (Gambar 3). Terdapat 7 tugas umum pemerintahan yang dijalankan oleh pemda dengan rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan tertinggi adalah pada sub bagian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sedangkan yang terendah pada sub bagian Pengelolaan Kawasan Khusus. Nilai rata-rata terendah untuk sub bagian Pengelolaan Kawasan Khusus ini kemungkinan juga disebabkan karena terdapat 9 propinsi yang tidak mengungkapkan tugas ini dalam LPPDnya. Hal ini kemungkinan karena memang tidak terdapat Kawasan Khusus yang harus dikelola dan kemudian dilaporkan oleh propinsi tersebut dalam LPPDnya. Propinsi Lampung merupakan propinsi yang paling baik dalam pengungkapan Tugas Umum Pemerintahan karena melaporkan 6 tugas secara lengkap.

Analisis Uji Beda Rata-rata Tingkat Pengungkapan LPPD

Setelah di sub bab sebelumnya dijelaskan mengenai tingkat kesesuaian pengungkapan yang diperoleh setiap pemda baik secara total maupun per bagian LPPD, maka di bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis uji beda rata-rata. Analisis dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan skor tingkat kesesuaian pengungkapan yang signifikan dari dua kelompok pemda jika dilihat dari besarnya aset, tingkat kemandirian daerah, letak geografis pemda (wilayah barat atau timur Indonesia) serta nilai skor EKPPDnya. Batasan pengelompokkan pemda didasarkan dari nilai median untuk masing-masing kategori (lihat Lampiran 3 untuk nilai median dari masing-masing kategori). Peneliti telah merangkum hasil uji beda rata-rata tersebut pada Tabel 2. Berdasarkan data di Tabel 2 tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan antara dua kelompok berbeda di empat kategori selain kategori besarnya aset.

Lebih lanjut, berdasarkan ke-25 sampel propinsi tahun 2010, ternyata rata-rata tingkat pengungkapan propinsi dengan aset kecil sama dengan propinsi yang asetnya besar. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya aset belum tentu menjamin propinsi tersebut akan secara lengkap melaporkan semua informasi

yang diminta regulasi dalam LPPDnya. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan aset yang kecil tidak membuat suatu propinsi tidak berusaha untuk memenuhi regulasi yang ada. Kepatuhan terhadap semua regulasi yang ada merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatian dari suatu pemda. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Setyaningrum et al. (2013) yang meneliti tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda tingkat dua. Setyaningrum et al. (2013) menjelaskan bahwa besarnya aset tidak berpengaruh kepada tingkat pengungkapan kemungkinan karena meskipun aset yang dimiliki Pemda besar namun sumber daya yang dimiliki Pemda kurang terampil dan memahami masalah pelaporan kinerja keuangan sehingga tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemda dengan aset yang besar tidak berbeda dengan pemda yang memiliki aset kecil.

Hasil untuk kategori yang kedua menunjukkan bahwa kelompok propinsi dengan tingkat kemandirian tinggi memiliki rata-rata skor pengungkapan yang lebih tinggi dibanding kelompok dengan tingkat kemandirian rendah. Hasil ini sejalan dengan Liestiani (2008) dan Setyaningrum et al. (2013). Semakin besar persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatannya maka akan membuat propinsi tersebut semakin memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dananya untuk mempekerjakan sumber daya yang berkompeten dalam membuat berbagai laporan yang menjadi kewajiban dari Pemda.

Dari kategori wilayah, propinsi yang berada di Indonesia bagian barat memiliki rata-rata tingkat pengungkapan LPPD yang lebih bagus dibanding propinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini kemungkinan besar ditunjang dengan fakta bahwa ketersediaan infrastruktur data dan informasi

yang lebih bagus di Indonesia bagian barat dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari kategori nilai EKPPD yang diperoleh, ternyata kelompok propinsi yang nilai EKPPDnya tinggi (di atas nilai median) memiliki rata-rata tingkat pengungkapan yang lebih rendah dibanding kelompok propinsi dengan nilai EKPPD rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan dari informasi yang ada dalam LPPD kemungkinan bukan merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap penilaian dari EKPPD. Dengan kata lain, penilaian EKPPD tidak mempertimbangkan kelengkapan informasi yang ada dalam LPPD namun lebih fokus kepada informasi-informasi dalam bentuk IKK-IKK yang terdapat dalam lampiran LPPD.

Selanjutnya, jika rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan antara dua kelompok pemda tersebut diuji secara statistik, hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD yang signifikan diantara dua kelompok propinsi untuk semua kategori. Dengan kata lain, rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD kelompok pemda propinsi berdasarkan besarnya aset, tingkat kemandirian, letak geografis serta nilai EKPPD sama.

Analisis Korelasi

Melanjutkan dua analisis sebelumnya, bagian ini menjelaskan hasil dari olah statistik untuk korelasi antara skor tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD dengan besarnya aset, tingkat kemandirian pemda, serta nilai EKPPD. Berdasarkan hasil uji *Pearson Correlation* yang terdapat di Tabel 3, dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara nilai tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD dari sampel 25 propinsi dengan ketiga variabel yang lain.

Tabel 2.
Hasil Uji Beda Rata-rata Skor Tingkat Kesesuaian Pengungkapan

No	Kategori	Rata-rata Skor Tingkat Kesesuaian Pengungkapan LPPD
1	Aset besar	0,75
	Aset kecil	0,75
2	Tingkat kemandirian tinggi	0,76
	Tingkat kemandirian rendah	0,73
3	Wilayah barat Indonesia	0,77
	Wilayah timur Indonesia	0,71
4	Nilai EKPPD tinggi	0,73
	Nilai EKPPD rendah	0,77

ASET = nilai ln total aset pemda 2010, tingkat kemandirian = PAD/total pendapatan, Wilayah Barat Indonesia = Pulau Sumatera dan Jawa, EKPPD = nilai EKPPD propinsi 2010,

Hasil korelasi ini mendukung hasil uji beda rata-rata pada sub bagian sebelumnya. Hal ini kemungkinan bisa dikarenakan data yang terlalu sedikit untuk dianalisis atau bisa juga karena terdapat faktor-faktor lain di luar ketiga variabel ini yang memiliki hubungan dengan tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD 2010. Faktor lain tersebut misalnya opini audit BPK dan nilai temuan BPK seperti yang ditemukan oleh Liestiani (2008) atau pembiayaan utang seperti yang ditemukan Darmastuti dan Setyaningrum (2012).

Selain itu, apabila dilihat dari hasil korelasi nilai EKPPD dengan

variabel yang lain di Tabel 3 tersebut, ternyata nilai EKPPD suatu pemda berhubungan positif signifikan dengan tingkat kemandirian pemda dan besarnya aset. Hal ini menunjukkan bahwa bukan masalah data yang digunakan sedikit sehingga nilai EKPPD tidak berhubungan dengan tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD namun mungkin disebabkan karena meskipun kelengkapan isi LPPD memiliki bobot dalam penilaian EKPPD namun bobot terbesar nilai EKPPD lebih dititikberatkan pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan pemerintah pusat dan dapat diverifikasi oleh tim penilai EKPPD.

Tabel 3.
Hasil Uji Korelasi

		SKOR	EKPPD	DAU	PAD	ASET
SKOR	Pearson Correlation	1	-.162	-.130	.043	.191
	Sig. (2-tailed)		.439	.536	.837	.359
EKPPD	Pearson Correlation		1	-.350	.652(**)	.489(*)
	Sig. (2-tailed)			.087	.000	.013
PAD	Pearson Correlation				1	.490(*)
	Sig. (2-tailed)					.013
ASET	Pearson Correlation					1
	Sig. (2-tailed)					

SKOR = nilai tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD 2010, EKPPD = nilai EKPPD propinsi 2010, PAD = tingkat kemandirian pemda 2010 (PAD/total pendapatan), ASET = nilai ln total aset pemda 2010.

SIMPULAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah LPPD yang berhasil diperoleh hanya sebanyak 25 LPPD propinsi sehingga data yang dianalisis sedikit. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan data yang lebih banyak bisa berupa LPPD dari pemda tingkat dua (kabupaten/kota) atau pemda propinsi namun dengan tahun yang lebih lama/panjang. Dengan data yang lebih banyak diharapkan analisis yang dilakukan bisa lebih menyeluruh seperti menggunakan metode analisis regresi. Namun perolehan data yang lebih banyak tersebut harus didukung oleh Kementerian dalam Negeri selaku pemerintah pusat sebagai pihak yang menerima LPPD dari pemda. Selain itu, penelitian berikutnya bisa juga memfokuskan bukan pada tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD dengan regulasi namun pada reliabilitas data yang ada dalam LPPD tersebut.

Berdasarkan sampel 25 LPPD pemda propinsi tahun 2010 tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa pemda belum mengungkapkan semua informasi sesuai dengan regulasi yaitu PP No. 3/2007 karena rata-rata tingkat kesesuaian pengungkapannya hanya 75% dengan range skor antara 32% sampai dengan 97%. Informasi yang paling sering tidak diungkapkan atau dilaporkan oleh pemda dalam LPPDnya adalah 1) informasi mengenai jumlah dan jenis karyawan dan 2) informasi mengenai permasalahan serta solusinya untuk setiap urusan atau tugas pemerintahan. Terdapat juga beberapa pemda yang tidak memberikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Berikutnya, jika dilihat dari analisis uji beda rata-rata ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik rata-rata tingkat kesesuaian

pengungkapan LPPD diantara dua kelompok propinsi untuk semua kategori, yaitu besarnya aset, tingkat kemandirian, letak wilayah propinsi serta nilai EKPPD. Begitu juga hasil dari uji korelasi yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD dengan besarnya aset, tingkat kemandirian daerah-, dan nilai EKPPD. Dua hasil pengujian yang secara statistik tidak signifikan ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh data yang terlalu sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang bisa diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Terkait dengan informasi karyawan, sebaiknya tidak perlu disajikan untuk setiap urusan pemerintahan karena hal ini menyulitkan SKPD yang ada di pemda, terutama SKPD yang menangani lebih dari satu urusan pemerintahan. Informasi mengenai pegawai ini cukup disajikan sesuai dengan SKPD yang ada dalam masing-masing pemda.
2. Terkait dengan pemanfaatan LPPD sebagai informasi utama untuk EKPPD, seharusnya diberikan bobot penilaian yang lebih besar untuk faktor kelengkapan pengungkapan informasi dalam LPPD. Dengan demikian pemda tidak hanya fokus pada data-data IKK saja namun juga akan berusaha untuk mengungkapkan semua informasi penyelenggaraan pemerintahannya dalam LPPD sehingga tujuan utama pembuatan LPPD sebagai alat akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan otonomi daerah akan terwujud.
3. Terkait dengan ketersediaan LPPD atau data-data publik lain sebagai bahan penelitian, disarankan agar Kementerian Dalam Negeri memiliki bagian khusus penyediaan data-data publik tersebut, bisa dalam bentuk

perpustakaan atau dalam bentuk pusat database. Dengan demikian, penelitian yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi dapat lebih mudah dilakukan karena terjaminnya kesediaan data (baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*).

Sedangkan saran yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah adalah propinsi harus tetap berusaha untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam LPPDnya agar sesuai dengan regulasi meskipun saat ini bobot penilaian untuk kelengkapan informasi dalam penilaian EKPPD masih sangat kecil. Pemda jangan hanya fokus pada masalah penyediaan informasi IKK dan mengabaikan informasi yang lain karena LPPD merupakan suatu bentuk laporan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemda secara menyeluruh atas penyelenggaraan tugas dan urusan pemerintahan pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, T. 2007. "Coercion versus choice: Citizen evaluations of public service quality across methods of consumption". *Public Administration Review*, vol. 64: 559-572
- Budianto, W. 2012. *Pengaruh opini, temuan audit dan gender terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2010*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Dalimunthe, T.M. 2010. *Review kinerja pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2008*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Darmastuti, D., & Setyaningrum, D. 2012. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009". In: *Proceedings of Symposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin*, September 2012.
- Dhuanovawati, M. 2010. *Analisis atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Febriana, A. 2010. *Analisis tingkat kinerja pemerintah daerah dengan standar pelayanan minimal berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2008*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Hilmi, A.Z., & Martani, D. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi". In: *Proceedings of Symposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin*, September 2012.
- Ho, A.T.K., & Park, J. 2012. "Toward a communicative theory of government performance". In: *Presented at Korea Association of Public Administration*.
- Ingram, R.W. 1984. "Economic incentives and the choice of state government accounting practices". *Journal of Accounting Research*. Vol. 22. No. 1: 126-144.
- Lesmana, S.I. 2010. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia*. 7 Desember 2011. Universitas Sebelas Maret. <http://eprints.uns.ac.id/6/1/169921211201009511.pdf>
- Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Mccall, S.M. 2009. An analysis of local government performance measurement reports. *Disertation*, Askew School Of Public Administration And Public Policy.
- Mustikarini, W.A., & Fitriasari, D. 2012. "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK

- terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun Anggaran 2007". In: *Proceedings of Simposium Nasional Akuntansi 15*, Banjarmasin, September 2012.
- Moore, Adrian., Nolan, J, Geoffrey F. S. 2005. "Putting Out the Trash Measuring Municipal Service Efficiency in U.S. Cities". *Urban Affairs Review*, Vol. 41, No. 2 (November 2005): 237-259.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Pranataningrum, R.A. 2012. *Pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2010*. Skripsi Sarjana, FEUI, Depok.
- Retina, Z. 2007. *Tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terhadap PP No.24 Tahun 2005 dan hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan total aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Robbins, W.A., & Austin, K.R. 1986. "Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound Measure". *Journal of Accounting Research*. Vol. 24. No. 2: 412-421.
- Ryan, C.M., Stanley, T.A., & Nelson, M. 2002. "Accountability disclosures by queensland local government councils: 1997-1999". *Financial Accountability & Management*, 18(3): 261-289.
- Setyaningrum, D., Andriani, E, & Fitriasari, D. 2013. "Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah". Working paper, Universitas Indonesia, 2013.
- Shang, H., & Hui, C. 2011. "Local government performance evaluation in China: Deadlocks and a data mining way to get out". In: *Proceedings of Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering*, Wuhan Hubei China.
- Smith, K.A, & Schiffel, L. 2009. "Improvements in city government performance reporting". *The Journal of Government Financial Management*, Summer 2009, 58, 2: 36.
- Steccolini, I. 2002. "Local government annual report: An accountability Medium?". working paper, working paper series, SDA Bocconi.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yue, Z., & Huping, S. 2011. "Index design for local government performance evaluation based on data mining". In: *Proceedings of Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering*, Wuhan Hubei China.
- Zhao, L. 2011. "Policy performance evaluation of local government: Value orientation and influencing factor". In: *Proceedings of Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering*, Wuhan Hubei China.

Lampiran 1. Sampel Penelitian

No	Propinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Kepulauan Riau
6	Bangka Belitung
7	Sumatera Selatan
8	Lampung
9	Bengkulu
10	Jakarta
11	Banten
12	Jawa Barat
13	Jawa Tengah
14	Yogyakarta
15	Jawa Timur
16	Kalimantan Timur
17	Kalimantan Barat
18	Kalimantan Selatan
19	Sulawesi Selatan
20	Sulawesi Utara
21	Sulawesi Tenggara
22	Gorontalo
23	Maluku Utara
24	Nusa Tenggara Timur
25	Papua Barat

Lampiran 2. Ceklist Tingkat Pengungkapan

1. Pendahuluan
 - dasar hukum - 1 poin
 - gambaran umum daerah (kondisi geografis, demografis dan ekonomi) – 10 poin
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - visi dan misi – 2 poin
 - strategi dan arah kebijakan daerah – 2 poin
 - prioritas daerah – 1 poin
3. Urusan Desentralisasi
 - ringkasan urusan desentralisasi – 12 poin
 - prioritas urusan wajib yang dilaksanakan (terdiri dari 26 urusan wajib) – masing-masing urusan 16 poin sehingga total 416 poin
 - prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan (maksimal 8 urusan) – masing-masing urusan 16 poin sehingga maksimal 128 poin
 - indikator kinerja kunci – 3 poin
4. Tugas Pembantuan
 - tugas pembantuan yang diterima (jika ada) – 15 poin
 - tugas pembantuan yang diberikan (jika ada) – 7 poin
5. Tugas Umum Pemerintahan
 - kerjasama antar daerah – 17 poin

- kerjasama daerah dengan pihak ketiga – 17 poin
 - koordinasi dengan instansi vertikal di daerah – 14 poin
 - pembinaan batas wilayah – 9 poin
 - pencegahan dan penanggulangan bencana – 13 poin
 - pengelolaan kawasan khusus – 12 poin
 - penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum – 12 poin
6. Penutup – 1 poin

Lampiran 3. Statistik Deskriptif Data Sampel

No	Kategori	Maks	Min	Median
1	Aset	407.096.408.253.177	1.100.677.281.970	6.483.495.799.893
2	Tingkat kemandirian	0,7444	0,0369	0,4251
3	Nilai EKPPD	2,7696	1,4392	2,2650